



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**LAPORAN EVALUASI KINERJA
BADAN USAHA MILIK DAERAH PADA PD ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN BUKU 2022**

**NOMOR: PE.09.03/LHP-252/PW14/4/2023
TANGGAL 25 JULI 2023**

DAFTAR ISI

BAB I SIMPULAN DAN SARAN	1
A. SIMPULAN	1
B. S A R A N	4
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI	6
A. Dasar Evaluasi	6
B. Tujuan dan Cakupan Evaluasi	6
C. Batasan Tanggung Jawab.....	6
D. Informasi Umum	7
E. Hasil Evaluasi Kinerja.....	9
1.Perspektif Kinerja	9
a.Aspek Keuangan.....	10
b.Aspek Operasional.....	14
c.Aspek Administrasi.....	18
2.Analisis Kinerja.....	19
a.Analisis Penerapan GRC	19
b.Analisis Going Concern	21
c.Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan BUMD.....	22
d.Kontribusi Fiskal.....	23
e.Identifikasi Risiko Fraud.....	24
3.Informasi Penting Lainnya	24

Lampiran-Lampiran

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas
4. Perhitungan Kinerja Perusahaan



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-252/PW14/4/2023 25 Juli 2023
Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Laporan Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik
Daerah Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat Tahun Buku 2022

Yth. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Daerah Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat
di Pontianak

**BAB I
SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang kami lakukan terhadap Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat (PD Aneka Usaha) tahun 2022, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

A. SIMPULAN

1. Hasil Evaluasi Kinerja

Kinerja PD Aneka Usaha untuk tahun buku 2022 berdasarkan indikator dan parameter kinerja yang dikembangkan oleh BPKP yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 539/7656/SJ dan 559/7655/SJ tanggal 23 Oktober 2017 tentang Modul Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah mendapatkan nilai 55,30 atau masuk kategori "Kurang Sehat BBB" dengan rincian sebagai berikut:

a. Aspek Keuangan

Kinerja aspek keuangan mendapatkan nilai sebesar 33,50 dari nilai maksimal 70,00 atau dengan capaian sebesar 47,86%.

Dari 8 (delapan) indikator penilaian pada aspek keuangan, terdapat 4 (empat) indikator penilaian yang belum memperoleh nilai maksimal, yaitu:

- (1) *Return on equity (ROE)*;
- (2) *Return on Investment (ROI)*;
- (3) Perputaran Total Aset; dan
- (4) Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset.

Hal ini disebabkan di antaranya Perusahaan belum melakukan manajemen biaya secara efektif dan efisien, khususnya pada beban administrasi dan umum sebesar Rp1.563.893.477,00 yang mencapai 87,34% dari jumlah beban usaha sebesar Rp 1.790.590.043,00. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan usaha yang diperoleh selama tahun 2022 sebesar Rp 174.393.415,00 sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekuitas yang ada.

b. Aspek Operasional

Kinerja aspek pelanggan mendapatkan nilai sebesar 11,80 dari nilai maksimal 15,00 atau dengan capaian sebesar 78,67%.

Dari 3 (tiga) indikator perspektif penilaian pada aspek operasional, terdapat 2 (dua) indikator perspektif belum memperoleh nilai maksimal, yaitu perspektif proses bisnis dan perspektif *learning and growth*.

Perusahaan belum melaksanakan kendali mutu yang memadai atas proses bisnis perusahaan, terlihat dari belum seluruh kegiatan perusahaan memiliki SOP dan belum seluruh SOP yang ada dijalankan dalam kegiatan perusahaan. Selain itu, belum terdapat *Research and Development* dalam rangka rencana pengembangan bisnis perusahaan.

c. Aspek Administrasi

Kinerja aspek administrasi mendapatkan nilai sebesar 10,00 dari nilai maksimal 15,00 atau dengan capaian sebesar 66,67%. Hal ini karena keterlambatan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

2. Analisis Kinerja

Analisis Kinerja dilakukan melalui identifikasi berdasarkan informasi hasil pengawasan tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

a. Analisis *Going concern*

Berdasarkan perhitungan prediksi kebangkrutan menggunakan model perhitungan *springate (springate model)*, Perusahaan mendapatkan nilai 1,05. Nilai tersebut sudah melebihi 0,862 sehingga Perusahaan tidak berpotensi untuk bangkrut.

b. Analisis Penerapan GRC

Berdasarkan hasil analisis penerapan GCG yang telah dilakukan, perusahaan mendapat kategori "Kurang" untuk seluruh aspek yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Nilai (5%)	Kategori
Tata Kelola/Governance	33	Kurang
Management Risiko/Risk	10	Kurang
SPI/Control	00	Kurang

Perusahaan belum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditandai dengan belum tersedianya berbagai infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti CoCG (*Code of Corporate Governance*), CoC (*Code of Conduct*), dan *Board Manual*. Selain itu, Perusahaan belum menyusun dan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko, serta belum melakukan identifikasi risiko dan membuat daftar risiko atas kegiatan bisnis perusahaan. Perusahaan juga belum membentuk Satuan Pengendalian Internal sehingga Aspek SPI mendapatkan capaian nilai 0. Pada tahun 2023 perusahaan telah membentuk Satuan Pengendalian Internal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2023. Namun pejabat SPI masih dirangkap oleh Kepala Bidang Keuangan.

c. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan BUMD

Perusahaan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Barat. Perusahaan juga telah menyelenggarakan kegiatan usaha untuk kemanfaatan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun masih terdapat usaha yang belum dilaksanakan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah. Selain itu, Perusahaan telah menyediakan barang yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat tetapi Perusahaan belum menerapkan analisis *feasibility study* (FS) atas pengembangan proses bisnis BUMD berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan belum efektif dalam mengelola BUMD.

d. Kontribusi Fiskal

Perusahaan pada tahun 2022 telah memberikan dividen kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan sebesar Rp100.000.000,00, dan penyetoran pajak daerah sebesar Rp59.162.504,00. Namun perusahaan belum

memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat baik melalui penyetoran pajak penghasilan (PPH) ataupun Pajak Pertambahan nilai (PPN). Hal tersebut disebabkan Perusahaan belum melakukan pencatatan dan pembukuan atas bukti pemotongan/pemungutan terhadap pendapatan yang dipungut PPh pasal 22 dan dipotong PPh pasal 23. Perusahaan juga belum melakukan pencatatan atas PPN Keluaran dan Masukan secara tertib. Selain itu, Perusahaan baru mendapatkan keuntungan pada tahun 2022, sehingga belum mengalokasikan pembayaran pajak badan.

e. Identifikasi Risiko Fraud

Tidak terdapat kejadian fraud di lingkungan perusahaan pada tahun 2022. Namun, terdapat kejadian fraud atas pembangunan, pengadaan, pemasangan, serta pelatihan mesin pabrik pupuk NPK pada tahun 2015 yang sedang dalam tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum.

3. Informasi Penting Lainnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Perusahaan telah memiliki Pedoman pengadaan jasa yang telah disahkan dengan Peraturan Direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2017, namun peraturan tersebut belum mendapatkan penetapan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pasal 92 ayat 2, Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. S A R A N

Terhadap permasalahan di atas, kami sarankan kepada Direksi Perusda Aneka Usaha agar melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu:

- a. Melakukan peningkatan kinerja aspek keuangan dengan:
 - 1) Melakukan diversifikasi usaha yang realistis dengan menerapkan analisis *feasibility study* (FS) atas pengembangan proses bisnis BUMD berdasarkan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Melakukan efisiensi dan pengendalian terhadap biaya-biaya operasional perusahaan melalui pengukuran terhadap setiap biaya yang dikaitkan dengan pendapatan perusahaan.

- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta didukung dengan pengesahan Kepala Daerah sebagai KPM.
 - 4) Melakukan analisis atas umur piutang perusahaan berdasarkan pedoman kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
- b. Melakukan peningkatan kinerja aspek operasional dengan:
- 1) Menyusun dan menetapkan SOP atas seluruh kegiatan operasional perusahaan dan menjalankan SOP yang telah dibuat tersebut.
 - 2) Melakukan *Research and Development* dalam setiap rencana pengembangan bisnis, untuk memitigasi risiko bisnis yang paling memengaruhi.
- c. Melakukan peningkatan Penerapan *Governance, Risk, and Control* (GRC) dengan:
- 1) Menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - 2) Membangun infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
 - 3) Menyusun dan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko serta melakukan identifikasi risiko kemudian membuat daftar risiko proses bisnis perusahaan.
- d. Memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak dengan:
- 1) Meminta bukti pemotongan/pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 ke pemotong/pemungut dan membukukannya.
 - 2) Melakukan pencatatan atas PPN Keluaran dan Masukan secara tertib.
- e. Mengusulkan penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Upaya tersebut di atas diharapkan dapat menciptakan kondisi yang baik, sehingga dapat membantu mempercepat terwujudnya visi dan misi perusahaan.



BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor OT.06.03/S-363/D4/05 tanggal 27 Maret 2023;
3. Surat Direktur Utama Perusda Aneka Usaha Nomor S-060/DU-PDAUV/2023 tanggal 3 Mei 2023 hal Permohonan Audit Kinerja Tahun Anggaran 2022; dan
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat Nomor PE.09/02/ST-450/PW14/4/2023 tanggal 26 Juni 2023.

B. Tujuan dan Cakupan Evaluasi

Tujuan evaluasi kinerja BUMD pada PD Aneka Usaha adalah penilaian atas capaian kinerja PD Aneka Usaha tahun 2022 dan memberikan saran perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja perusahaan, dengan sasaran evaluasi sebagai berikut:

1. Menilai perspektif kinerja;
 - a) Aspek keuangan.
 - b) Aspek operasional.
 - c) Aspek administrasi.
2. Menginformasikan hasil pengawasan;
 - a) Analisis *going concern*.
 - b) Analisis penerapan GRC.
 - c) Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD.
3. Menginformasikan peristiwa penting sampai saat evaluasi.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

Evaluasi kinerja ini dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

C. Batasan Tanggung Jawab

Data dan informasi terkait kinerja perusahaan serta keabsahannya merupakan tanggung jawab Manajemen. Laporan Hasil Evaluasi BPKP bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi merupakan kewenangan dari Klien dan/atau Mitra yang berwenang.

D. Informasi Umum

1. Uraian Ringkas Perusahaan

a. Pendirian

PD Aneka Usaha merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Namun demikian, secara historis yuridis PD Aneka Usaha berdiri pada tahun 1988 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 30 Maret 1988 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.41-829 tanggal 2 November 1989. Perusahaan menjalankan operasionalnya secara aktif sejak tahun 1996.

Pada tahun 2023, PD Aneka Usaha mengalami perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 6 April 2023.

PD Aneka Usaha memiliki izin operasional dan legalitas sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, penyediaan barang dan jasa dalam arti seluas-luasnya, baik dalam negeri maupun luar negeri serta usaha dan jasa yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan daerah.

b. Data Umum

- a. Nama : Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha
Perusahaan
- b. Alamat : Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 103 Pontianak
78116
- c. Telepon/Faksimili : Telp: 0561-762292; Faks: 0561-732614
- d. Alamat email : aneka_usaha@yahoo.com
- e. Website : -
- f. Visi Perusahaan : Badan Usaha Milik Daerah Yang Profesional
Untuk Membangun Daerah Kalimantan Barat

2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023, maksud dan tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha adalah:

- a. Menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. Turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- c. Membangun dan mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Memanfaatkan serta mendayagunakan sumber dana yang ada dan asset yang dimiliki guna meningkatkan daya saing perusahaan; dan
- e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi PD Aneka Usaha saat ini adalah struktur organisasi yang ditetapkan oleh Direktur Utama PD Aneka Usaha dengan mengacu kepada ketentuan pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Struktur organisasi PD Aneka Usaha terdiri dari:

- a. Badan Pengawas.
- b. Sekretariat Badan Pengawas.
- c. Direktur Utama.
- d. Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi 2 (dua) bidang yaitu:
 - 1) Bidang Keuangan dan Perpajakan;
 - 2) Bidang Administrasi dan Personalia.
- e. Direktur Teknik dan Pemasaran, membawahi 2 (dua) bidang yaitu:
 - 1) Bidang Teknik;
 - 2) Bidang Pemasaran.

Susunan Direksi PD Aneka Usaha berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1368/EKON/2019 tanggal 18 November 2019 tentang Pengangkatan Direksi PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2023 adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : H. Syariful Hamzah naully, S.IP.

- Direktur Administrasi dan Keuangan : Susanti, S.H., M.M.
- Direktur Operasional : Wahyu Cundrik Pamungkas, S.T.

Untuk mengawasi kegiatan usaha PD Aneka Usaha dibentuk Dewan Pengawas PD Aneka Usaha, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1367/EKON/2019 tanggal 18 November 2019, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : A.L. Leysandri, S.H.
- Sekretaris : Dr. Syarif Kamaruzaman.
- Anggota : Subhan Noviar, S.E., M.M.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 95/EKON/2021 tentang Pemberhentian dengan Hormat SDR. Subhan Noviar, SE. MM sebagai Dewan Pengawas Independent Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2023, sejak tanggal 29 Januari 2021 Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha hanya terdiri atas A.L Leysandri, S.H. Sebagai Ketua dan Dr. Syarif Kamaruzaman sebagai sekretaris.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) PD Aneka Usaha per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Direksi, 5 (lima) orang karyawan tetap dan 1 (satu) orang karyawan kontrak dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Jumlah
1.	S2 Pasca Sarjana (Magister)	1	1	-	2
2.	S1 Sarjana	2	1	3	6
3.	D III Sarjana Muda	-	-	1	1
.	Jumlah	3	2	4	9

4. Laporan keuangan Perusahaan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2022 telah diaudit oleh auditor independen dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Perusahaan belum melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri. Evaluasi kinerja didasarkan pada data yang diberikan oleh Perusahaan pada saat evaluasi kinerja dilaksanakan.

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2022 disajikan pada lampiran 1 s.d. 3.

E. Hasil Evaluasi Kinerja

1. Perspektif Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan indikator dan parameter kinerja yang dikembangkan oleh BPKP yang mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 539/7656/SJ dan 559/7655/SJ tanggal 23 Oktober 2017 tentang Modul Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Deputi BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 14 Tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja BUMD Aneka Usaha, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

SEHAT	KURANG SEHAT	TIDAK SEHAT
AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95	BBB apabila $50 < TS \leq 65$	CCC apabila $20 < TS \leq 30$
AA apabila $80 < TS \leq 95$	BB apabila $40 < TS \leq 50$	CC apabila $10 < TS \leq 20$
A apabila $65 < TS \leq 80$	B apabila $30 < TS \leq 40$	C apabila $TS \leq 10$

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang telah dilakukan, maka Perusahaan mendapatkan nilai **55,30** dari nilai maksimal 100,00 atau mencapai kategori **"Kurang Sehat BBB"** dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Bobot	Capaian
Keuangan	70,00	33,50
Operasional	15,00	11,80
Administrasi	15,00	10,00
Jumlah	100,00	55,30

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran 4.

Adapun uraian hasil evaluasi kinerja masing-masing aspek kinerja adalah sebagai berikut:

a. Aspek Keuangan

Penilaian kinerja keuangan meliputi penilaian atas rasio imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), rasio kas, rasio lancar, *collecting period*, perputaran persediaan, perputaran total asset, rasio modal sendiri terhadap aset. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja aspek keuangan PD Aneka Usaha tahun 2022 sebesar 33,50 dari nilai maksimal sebesar 70,00 atau dengan tingkat capaian 47,86%.

Penilaian kinerja aspek keuangan didasarkan atas laporan keuangan perusahaan tahun 2022 yang telah diaudit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Heru Satria Rukmana dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sesuai Laporan Auditor Independen Nomor 00040/2.1352/AU.2/11/1520-3/1/IV/2023 tanggal 28 April 2023.

Penilaian kinerja untuk aspek keuangan terdiri dari 8 (delapan) indikator yang meliputi rasio-rasio keuangan dengan uraian sebagai berikut:

1) *Return on Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham.

Capaian rasio ROE tahun 2022 sebesar 0,52% dari nilai optimal sebesar > 15% dan mendapat nilai kinerja 2,00 dari nilai maksimal 20,00.

2) *Return on Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan rasio laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produktif, dan saham penyertaan langsung terhadap posisi akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Capaian rasio ROI tahun 2022 sebesar 0,51% dari nilai optimal sebesar > 18% dan mendapat nilai kinerja 2,00 dari nilai maksimal 15,00.

3) *Rasio Kas*

Rasio Kas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di Bank.

Capaian rasio kas tahun 2022 sebesar 745,61% dari nilai optimal sebesar \geq 35% dan mendapat nilai kinerja 5,00 dari nilai maksimal 5,00.

4) *Rasio Lancar*

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.

Capaian rasio kas tahun 2022 sebesar 6.847,69% dari nilai optimal sebesar \geq 125% dan mendapat nilai kinerja 5,00 dari nilai maksimal 5,00.

Hasil analisis laporan keuangan rasio lancar sebesar 6.847,69% tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini karena dalam aktiva lancar sebesar Rp11.836.264.001,00 terdapat piutang lain-lain yang macet sebesar Rp4.001.818.542,00, persediaan berupa surat pernyataan tanah seluas 650 m² di Desa Mega Timur kecamatan Sui. Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp245.000.000,00 dan bahan baku pupuk NPK yang diperoleh tahun 2018 namun tidak dapat digunakan sebesar Rp4.711.360.000,00, dan memiliki status sebagai barang bukti oleh Penyidik Polres Kota Pontianak.

5) Efektifitas Penagihan/*Collection Period*

Efektivitas penagihan menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola pendapatan usahanya sehingga menjadi penerimaan kas bagi perusahaan, yang diukur dengan cara membandingkan jumlah penerimaan piutang usaha terhadap pendapatan usaha.

Capaian nilai *collection period* Tahun 2022 adalah selama 252 hari dari nilai optimal selama ≤ 60 hari serta mengalami perbaikan selama 92 hari dari nilai optimal ≥ 35 hari sehingga mendapat nilai kinerja *collection period* maksimal nilai kinerja 5 dari nilai maksimal 5.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penagihan piutang atas usaha yang sedang dijalankan dan mengubahnya menjadi *cash*. Namun, terdapat perbaikan nilai *collection period* yaitu tahun 2021 selama 344 hari menjadi selama 252 hari di tahun 2022.

Hasil analisis laporan keuangan, *collection period* selama 252 hari tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini karena dari piutang usaha sebesar Rp1.409.211.129,00, Perusahaan belum mencadangkan penyisihan piutang usaha.

6) Perputaran Persediaan

Perputaran persediaan digunakan untuk mengukur pengaruh seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan setengah jadi, dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang terhadap jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Capaian nilai perputaran persediaan Tahun 2022 adalah selama 885 hari dari nilai optimal selama ≤ 60 hari, mengalami perbaikan selama 182 hari dari nilai optimal ≥ 35 hari sehingga mendapat nilai kinerja 5 dari nilai maksimal 5.

Hasil analisis laporan keuangan, perputaran persediaan selama 885 hari tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini karena dari persediaan sebesar Rp4.956.360.000,00 terdiri atas surat pernyataan tanah seluas 650 m² di Desa Mega Timur kecamatan Sui. Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp245.000.000,00 dan persediaan bahan

baku pupuk NPK yang diperoleh tahun 2018 dan tidak dapat digunakan sebesar Rp4.711.360.000,00, sebagai barang bukti oleh Penyidik Polres Kota Pontianak.

Capaian nilai perputaran persediaan mengalami perbaikan disebabkan oleh keuntungan yang didapat oleh perusahaan pada tahun 2022, bukan disebabkan terdapat perbaikan dalam mengelola persediaan yang signifikan untuk memenuhi pendapatan usaha yang akan dicapai dibandingkan tahun lalu.

7) Perputaran Total Aset

Perputaran total aset digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dari total aset yang dimiliki dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset.

Capaian nilai perputaran total aset Tahun 2022 adalah sebesar 6,01% dari nilai optimal > 120% serta mengalami perbaikan sebesar 1,24% dari nilai optimal \geq 20% sehingga mendapat nilai kinerja perputaran total aset sebesar 3 dari nilai maksimal sebesar 5.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cukup mampu mengelola aset untuk memperoleh pendapatan dari aset yang dimiliki.

8) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

Rasio modal sendiri terhadap total aktiva digunakan untuk mengukur pengaruh total modal sendiri terhadap total aktiva yang dimiliki.

Capaian nilai rasio modal sendiri terhadap total aktiva Tahun 2022 adalah sebesar 144,97% dari nilai optimal \geq 30% dan < 40% dan mendapat nilai kinerja rasio modal sendiri terhadap total aktiva sebesar 6,50 dari nilai maksimal sebesar 10,00.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa total aktiva yang dimiliki sepenuhnya dibiayai dari modal yang dimiliki perusahaan.

Belum optimalnya kinerja aspek keuangan antara lain disebabkan oleh:

- 1) Terdapat aset yang dimiliki oleh Perusahaan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan antara lain pabrik pupuk NPK karena dalam tahap penyidikan APH.
- 2) Perusahaan belum melakukan manajemen biaya secara efektif dan efisien, khususnya pada beban administrasi dan umum sebesar Rp1.563.893.477,00 yang mencapai 87,34% dari jumlah beban usaha

sebesar Rp 1.790.590.043,00. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan usaha yang diperoleh selama tahun 2022 sebesar Rp 174.393.415,00 sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai ekuitas yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada aspek keuangan, disarankan kepada Direksi PD Aneka Usaha agar:

- 1) Melakukan diversifikasi usaha yang realistis dengan menerapkan analisis *feasibility study* (FS) atas pengembangan proses bisnis BUMD berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- 2) Melakukan efisiensi dan pengendalian terhadap biaya-biaya operasional perusahaan melalui pengukuran terhadap setiap biaya yang dikaitkan dengan pendapatan perusahaan.
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta didukung dengan pengesahan Kepala Daerah sebagai KPM.
- 4) Melakukan analisis atas umur piutang perusahaan berdasarkan pedoman kebijakan akuntansi yang ditetapkan.

b. Aspek Operasional

Penilaian kinerja aspek operasional meliputi penilaian atas perspektif pelanggan, proses bisnis serta *learning and growth*.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian nilai kinerja aspek operasional Tahun 2022 sebesar 11,80 dari nilai maksimal sebesar 15,00 atau dengan capaian 78,67%.

1) Perspektif Pelanggan

- Perspektif pelanggan merupakan penilaian dan pelayanan produk/jasa terhadap pelanggan. Untuk menilai keberhasilan perspektif pelanggan digunakan indikator sebagai berikut:

a) Tingkat Penyelesaian Pengaduan Pelanggan

Tingkat pemenuhan indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah pengaduan dan keluhan dari pelanggan yang dapat diselesaikan dengan keseluruhan jumlah pengaduan dan keluhan dari pelanggan.

Selama tahun 2022, seluruh pengaduan/keluhan yang disampaikan oleh pelanggan penyewaan kios dapat diselesaikan oleh perusahaan.

Dengan demikian nilai capaian indikator ini mencapai 100,00% dan mendapat nilai kinerja 2 dari nilai maksimal 2.

b) Tingkat Pertumbuhan Pelanggan

Tingkat pertumbuhan pelanggan diukur dengan cara membandingkan jumlah pelanggan akhir tahun dikurangi jumlah pelanggan akhir tahun sebelumnya dengan jumlah pelanggan akhir tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Perusahaan memiliki 41 pelanggan. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 6 pelanggan atau 17,14% dari tahun 2021. Dengan demikian, capaian untuk indikator ini adalah 100% dan mendapat nilai kinerja 2 dari nilai maksimal 2.

c) Indeks Kepuasan Pelanggan

Indeks kepuasan pelanggan diukur dengan membandingkan realisasi kepuasan pelanggan dengan target kepuasan pelanggan.

Perusahaan telah melakukan penilaian kepuasan pelanggan dengan memberikan lembar survei kepada pelanggan. Dari hasil survei tersebut didapat bahwa tingkat kepuasan pelanggan adalah 87,66% dan mendapat nilai kinerja 3 dari nilai maksimal 3.

2) Perspektif Proses Bisnis

Perspektif proses bisnis untuk melihat penilaian proses penting yang mendukung strategi perusahaan. Untuk menilai keberhasilan perspektif proses bisnis digunakan indikator sebagai berikut:

a) Kualitas Produk/Jasa yang dihasilkan

Tingkat pemenuhan indikator ini diukur dengan cara membandingkan jumlah produk/jasa sesuai Quality Control/SOP dengan jumlah produk/jasa.

Pada tahun 2022 Perusahaan melakukan enam kegiatan usaha yaitu penyewaan kios, penyewaan armada angkutan pasir, lumbung pangan, penjualan ATK, loket Pembayaran Online/Payment Point Online Bank (PPOB), serta Pendistribusian/Pemasaran Produk Holtikultura, Produk Migas, Produk Kerajinan, dan Produk Masyarakat. Perusahaan telah menyusun prosedur operasi standar (SOP) atas kegiatan usaha tersebut, yaitu:

- (1) Prosedur Operasi Standar Pengelolaan/Penyewaan *Tug Boat* "Mandau" dan Tongkang "Tamang" dengan Nomor 01/SOP/II/2018 tanggal 08 Januari 2018.
- (2) Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Unit Travel dan PPOB Revisi ke-1 dengan Nomor 02/SOP/VIII/2020 tanggal 03 Agustus 2020.
- (3) Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Pusat Kuliner dan Oleh-Oleh Revisi ke-1 dengan Nomor 01/SOP/IV/2020 tanggal 01 April 2020.
- (4) Standar Operasional Prosedur Penjualan Beras yang berlaku tanggal 1 Oktober 2021.
- (5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian/Pemasaran Produk-Produk Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02/SOP/II/2019 yang berlaku tanggal 7 Januari 2019.

Selama tahun 2022, dari 5 (lima) SOP yang dimiliki, hanya 2 (dua) SOP yang sepenuhnya diimplementasikan oleh Perusda Aneka Usaha yaitu Prosedur Operasi Standar Pengelolaan Unit Travel dan PPOB dan Prosedur Operasi Standar Pengelolaan/Penyewaan *Tug Boat* "Mandau" dan Tongkang "Tamang". Selain itu, terdapat satu proses bisnis berupa Usaha Alat Tulis dan Kantor yang belum memiliki SOP. Dengan demikian, capaian untuk indikator kualitas produk/jasa yang dihasilkan adalah 20% dan mendapat nilai 0,4 dari nilai maksimal 2.

b) Tingkat Penjualan Produk/Jasa yang Dihasilkan

Indikator tingkat penjualan produk atau jasa yang dihasilkan diukur dengan membandingkan jumlah produk/jasa yang terjual dengan jumlah produk/jasa. Pada tahun 2022, dari enam usaha yang dilakukan oleh perusahaan, 5 (lima) di antaranya sudah dijalankan/terjual, sedangkan usaha pendistribusian dan pemasaran produk tidak dilaksanakan. Perusahaan hanya menyediakan tempat kios untuk Pendistribusian/Pemasaran Produk Holtikultura, Produk Migas, Produk Kerajinan, dan Produk Masyarakat kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Perusda Aneka Usaha dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Nomor $\frac{023/SPK/TP-PDAU/1/2022}{21/SPK/KUKM.IV/2022}$ tanggal 10 Januari 2023.

Dengan demikian, capaian untuk indikator kualitas produk/jasa yang dihasilkan adalah 80% dan mendapat nilai 1,6 dari nilai maksimal 2.

3) Perspektif *Learning and Growth*

Perspektif *learning and growth* merupakan penilaian untuk melihat penilaian dan pelayanan kepedulian manajemen terhadap tingkat pembelajaran dan pertumbuhan kemajuan perusahaan.

a) Penggunaan TI dalam Penyediaan Produk/Jasa kepada Pelanggan

Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan antara jumlah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam penyediaan produk/jasa kepada pelanggan dengan jumlah proses bisnis utama badan usaha.

Perusahaan telah menggunakan 2 (dua) sistem informasi/aplikasi yaitu Travel MBC sebagai aplikasi penjualan tiket online dan layanan PPOB serta Mbiz Market untuk penjualan ATK dan percetakan. Dengan demikian, capaian nilai untuk indikator ini adalah 80% atau mendapat nilai 1,6 dari nilai maksimal 2.

b) Pencapaian Target Biaya Pengembangan

Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan Beban *Research and Development* dengan Beban Usaha secara keseluruhan.

Perusahaan telah menganggarkan biaya Penelitian dan Pengembangan pada RKAP sebesar Rp100.000.000,00, tetapi perusahaan belum merealisasikan biaya tersebut. Dengan demikian, nilai capaian yang diperoleh untuk indikator ini adalah 0,2 dari nilai maksimal 1.

c) Rasio Diklat Pegawai

Rasio diklat pegawai diukur dengan membandingkan jumlah pegawai yang mengikuti diklat dengan jumlah total pegawai. Pada tahun 2022, pegawai perusahaan yang berjumlah enam orang, seluruhnya telah mengikuti diklat sesuai dengan proses bisnis perusahaan yaitu Pelatihan Penerapan Manajemen Risiko pada Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian nilai capaian yang diperoleh adalah 100% dan mendapat nilai 1 dari nilai maksimal 1.

Belum optimalnya kinerja aspek operasional antara lain disebabkan oleh:

- 1) Belum dilaksanakannya kendali mutu yang memadai atas proses bisnis perusahaan, terlihat dari belum seluruh kegiatan perusahaan memiliki SOP dan belum seluruh SOP yang ada dijalankan dalam kegiatan perusahaan.
- 2) Perusahaan belum melakukan *Research and Development* dalam rangka rencana pengembangan bisnis.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pada aspek operasional, disarankan kepada Direksi Perusda Aneka Usaha agar:

- 1) Menyusun dan menetapkan SOP atas seluruh kegiatan operasional perusahaan dan menjalankan SOP yang telah dibuat tersebut.
- 2) Melakukan *Research and Development* dalam setiap rencana pengembangan bisnis, untuk memitigasi risiko bisnis yang paling memengaruhi.

c. Aspek Administrasi

Administrasi merupakan salah satu bagian yang penting di dalam mengelola suatu perusahaan. Apapun jenis usahanya dan seberapa besar atau kecil perusahaan yang dijalankan tidak akan luput dari peran administrasi guna mendukung kelancaran bisnis dan menopang pertumbuhan usaha.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian nilai kinerja aspek administrasi Tahun 2022 sebesar 10,00 dari nilai maksimal sebesar 15,00.

Penilaian kinerja untuk aspek administrasi terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu ketepatan waktu laporan tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

1) Ketepatan Waktu Laporan Tahunan

Standar jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang harus sudah diterima oleh Kepala Daerah sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan atau Laporan Keuangan *Unaudited* yang telah ditandatangani oleh direksi.

Perusahaan telah menyampaikan laporan manajemen dan laporan keuangan *unaudited* kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat tepat waktu yaitu pada tanggal 28 Februari 2023 sehingga mendapat nilai

ketepatan waktu penyampaian laporan tahunan sebesar 10,00 atau sudah maksimal.

2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Penilaian atas indikator ini dilakukan dengan menganalisis ketepatan waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Perusahaan telah menyusun RKAP sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan tahun 2022 dan telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan telah disampaikan kepada Kepala Daerah pada bulan November 2021, namun terdapat perbaikan atas RKAP tersebut sehingga baru diajukan kembali dan mendapat pengesahan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada bulan Maret 2022. Proses pengajuan hingga pengesahan RKAP tersebut memakan waktu selama 4 bulan sehingga capaian nilai ketepatan waktu penyampaian RKAP sebesar 0 dari nilai maksimal 5.

2. Analisis Kinerja

a. Analisis Penerapan GRC

Perusahaan belum melakukan Asesmen Tata Kelola Perusahaan yang Baik/*Good Corporate Governance* (GCG), Penilaian Maturitas Manajemen Risiko dan Penilaian Kapabilitas SPI.

Analisis kinerja dilakukan secara generik berdasarkan indikator dan parameter kinerja yang dikembangkan oleh BPKP yang mengacu pada Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor OT.06.03/S-363/D4/05/2023 tanggal 27 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja pada BUMD Aneka Usaha, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

NILAI (%)	KATEGORI
• Di atas 75	Baik
• 50 s.d. 75	Cukup
• Di bawah 50	Kurang

Berdasarkan hasil analisis penerapan GCG yang telah dilakukan, perusahaan mendapat kategori "Kurang" untuk seluruh aspek yang ada, dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Nilai (%)	Kategori
Tata Kelola/Governance	33	Kurang
Management Risiko/Risk	10	Kurang
SPI/Control	00	Kurang

Adapun uraian hasil analisis kinerja masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1) Aspek Tata Kelola (*Governance*)

Aspek Tata Kelola mendapat capaian nilai sebesar 33% dari nilai maksimal 100% tergolong dalam kategori "Kurang".

Dari 20 indikator penilaian aspek dalam rangka mendukung peningkatan kinerja, pencegahan fraud serta menyehatkan pengelolaan perusahaan, Perusahaan belum menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditandai dengan belum tersedianya berbagai infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik seperti CoCG, CoC, dan *Board Manual*. Belum ditetapkannya secara definitif beserta uraian tugas struktur pelaksana dan pemantau pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta belum terlihatnya proses pelaksanaan tata kelola berdasarkan infrastruktur tata kelola tersebut.

Namun, perusahaan telah menyusun Renbis dan RKAP yang telah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pengawas. Perusahaan juga telah Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan secara tepat waktu kepada *stakeholders*.

Atas permasalahan tersebut kami sarankan kepada Direktur Utama Perusahaan agar:

- a) Menyusun dan menetapkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- b) Membangun infrastruktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik;

2) Management Risiko (*Risk*)

Aspek manajemen risiko mendapat capaian nilai sebesar 10% dari nilai maksimal 100% dengan kategori "Kurang". Perusahaan belum menyusun dan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko, perusahaan juga belum melakukan identifikasi risiko dan membuat daftar risiko atas kegiatan bisnis perusahaan. Namun, perusahaan pada Rencana Bisnis Perusahaan tahun 2020-2024 telah melakukan analisis pengaruh lingkungan eksternal dan internal dengan menggunakan analisis SWOT.

Atas permasalahan tersebut kami sarankan kepada Direktur Utama Perusahaan agar menyusun dan menetapkan Pedoman Manajemen Risiko serta melakukan identifikasi risiko kemudian membuat daftar risiko proses bisnis perusahaan.

3) Satuan Pengendalian Internal (SPI)

Pada tahun 2022 perusahaan belum membentuk Satuan Pengendalian Internal sehingga Aspek SPI mendapatkan capain nilai 0.

Pada tahun 2023 perusahaan telah membentuk Satuan Pengendalian Internal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2023. Namun pejabat SPI masih dirangkap oleh Kepala Bidang Keuangan.

b. Analisis Going Concern

Berdasarkan perhitungan prediksi kebangkrutan menggunakan model perhitungan *springate (springate model)* dengan rumus:

$$S = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4$$

Dimana:

X1 adalah modal kerja/total aset

(modal kerja = aset lancar - kewajiban lancar)

X2 adalah EBIT dibagi total aset

X3 adalah EBT dibagi utang lancar

X4 adalah Penjualan dibagi total aset

Dengan: $S > 0,862$ perusahaan tidak berpotensi bangkrut

$S < 0,862$ perusahaan berpotensi bangkrut

Perhitungan prediksi kebangkrutan menggunakan model perhitungan *springate (springate model)* untuk tiga tahun buku terakhir sebagai berikut:

No.	Uraian	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)
1	Aset Lancar	11.655.364.426	11.533.116.624	11.836.264.001
2	Kewajiban Lancar	336.487.551	328.679.251	172.850.351
3	Modal Kerja (1 - 2)	11.318.876.875	11.204.437.373	11.663.413.650
4	Total Aset	35.000.805.611	34.411.401.223	34.429.974.738
5	EBIT	(819.131.240)	(581.596.089)	174.393.414
6	EBT	(819.131.240)	(581.596.089)	174.393.414
7	Penjualan	1.305.013.433	1.503.202.902	2.043.507.175

No.	Uraian	2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)
8	X1 = (3 / 4)	0,32	0,33	0,34
9	X2 = (5 / 4)	(0,02)	(0,02)	0,01
10	X3 = (6 / 2)	(2,43)	(1,77)	1,01
11	X4 = (7 / 4)	0,04	0,04	0,06
12	S	(1,33)	(0,87)	1,05

Dari tabel di atas, pada tahun 2022 Nilai S sudah melebihi 0,862 sehingga Perusahaan tidak berpotensi untuk bangkrut. Hal tersebut karena aspek keuangan yang mampu menopang operasional perusahaan.

Jika dilihat dari aspek pelayanan Perusahaan pada tiga tahun terakhir tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

c. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan BUMD

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui bahwa Perusahaan telah memberikan manfaat atau kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui dividen atas penyertaan modal PDAU sebesar Rp100.000.000,00. Hal tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu dengan kontribusi dividen atas penyertaan modal PDAU sebesar Rp0,00.

Pada tahun 2022, Perusahaan bergerak di bidang perdagangan serta penyediaan barang dan jasa, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Perusahaan telah menyelenggarakan kegiatan usaha untuk kemanfaatan umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat usaha yang belum dilaksanakan yaitu usaha pendistribusian/pemasaran produk hortikultura, produk Migas, produk Kerajinan, dan produk masyarakat sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah.

Perusahaan telah menyediakan barang yang bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Usaha yang sudah memenuhi barang dengan Standar Nasional Indonesia adalah usaha lumbung pangan dengan produk berupa beras. Untuk meningkatkan produk mutu dan layanan masyarakat, Perusahaan membeli beras dari Pulau Jawa. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak Perusahaan, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas barang, memenuhi kebutuhan dan permintaan dari masyarakat.

Perusahaan belum menerapkan analisis *feasibility study* (FS) atas pengembangan proses bisnis BUMD berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perusahaan masih membutuhkan beberapa tambahan pegawai untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran, maka hal tersebut tidak bisa dilakukan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum efektif dalam mengelola BUMD.

d. Kontribusi Fiskal

Pada tahun 2022 Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan rincian:

No	Jenis Kontribusi Fiskal	Jumlah	
1	Dividen atas Penyertaan Modal PDAU	Rp	100.000.000,00
2	Pajak Pusat		
	- PPN	Rp	-
	- PPh Pasal 22	Rp	-
	- PPh Pasal 23	Rp	-
	- PPh Badan	Rp	-
	Jumlah	Rp	-
3	Pajak Daerah dan Retribusi		
	- Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	10.111.300,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan	Rp	49.051.204,00
	- Retribusi	Rp	-
	Jumlah	Rp	59.162.504,00

Perusahaan pada tahun 2022 telah memberikan dividen kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan sebesar Rp100.000.000,00, dan penyetoran pajak daerah sebesar Rp59.162.504,00. Namun perusahaan belum memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat baik melalui penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) ataupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Hal ini disebabkan:

- 1) Perusahaan belum melakukan pencatatan dan pembukuan atas bukti pemotongan/pemungutan terhadap pendapatan yang dipungut PPh pasal 22 dan dipotong PPh pasal 23.
- 2) Perusahaan belum melakukan pencatatan atas PPN Keluaran dan Masukan secara tertib.
- 3) Perusahaan baru mendapatkan keuntungan pada tahun 2022, sehingga belum mengalokasikan pembayaran pajak badan.

Atas Permasalahan tersebut kami sarankan kepada Direksi Perusda Aneka Usaha agar:

1) Meminta bukti pemotongan/pemungutan PPh pasal 22 dan pasal 23 ke pemotong/pemungut dan membukukannya.

2) Melakukan pencatatan atas PPN Keluaran dan Masukan secara tertib.

e. Identifikasi Risiko Fraud

Perusahaan belum membentuk unit khusus pengelola risiko serta belum melakukan penanganan terhadap risiko kecurangan. Hal ini terlihat dari belum dilakukannya identifikasi *fraud* berupa daftar risiko *fraud* dan belum dibentuknya Satuan Pengawasan Internal.

Tidak terdapat kejadian *fraud* di lingkungan perusahaan pada tahun 2022, namun terdapat kejadian *fraud* atas pembangunan, pengadaan, pemasangan, serta pelatihan mesin pabrik pupuk NPK pada tahun 2015 yang sedang dalam tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum.

3. Informasi Penting Lainnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang telah disahkan dengan Peraturan Direksi Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05 Tahun 2017, namun peraturan tersebut belum mendapatkan penetapan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 pasal 92 ayat 2, Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan pengetahuan SDM Perusahaan dalam memahami peraturan yang ada.

Atas permasalahan tersebut kami sarankan kepada Direktur Utama Perusda Aneka Usaha agar melalui Dewan Pengawas mengusulkan penetapan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa kepada Gubernur Kalimantan Barat.

PD ANEKA USAHA
 NERACA KOMPARATIF
 PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
I	ASET LANCAR		
	Kas dan Setara Kas	1.288.798.030,00	1.184.880.713,00
	Piutang Usaha	1.409.211.129,00	1.419.211.129,00
	Piutang Lain-lain	4.001.818.542,00	3.972.664.782,00
	Persediaan	4.956.360.000,00	4.956.360.000,00
	Penyertaan	180.076.300,00	-
	Biaya Dibayar Dimuka	-	-
	Jumlah Aset Lancar	11.836.264.001,00	11.533.116.624,00
II	ASET TIDAK LANCAR		
	Investasi Penyertaan Modal	-	180.076.300,00
	Aset Tetap (Net)	19.957.947.540,00	20.000.944.417,00
	Beban Pensiun Ditangguhkan	-	-
	Properti Investasi	-	-
	Aset Tidak Lancar Lainnya	2.635.763.197,00	2.697.263.882,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar	22.593.710.737,00	22.878.284.599,00
	JUMLAH ASET	34.429.974.738,00	34.411.401.223,00
III	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
	Hutang Usaha	-	-
	Hutang Langganan Daya dan Jasa	-	3.078.900,00
	Hutang Gaji Honor Badan Pengawas	172.850.351,00	172.850.351,00
	Hutang Pajak	-	-
	Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	5.150.000,00
	Pendapatan diterima di muka	-	147.600.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	172.850.351,00	328.679.251,00
IV	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
	Pinjaman Jangka Panjang	-	-
	Hutang Beban Pajak Tangguhan	447.942.693,00	447.942.693,00
	Hutang Imbal Kerja	131.143.146,00	131.143.146,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	579.085.839,00	579.085.839,00
V	EKUITAS DAN CADANGAN		
	Modal Dasar	49.912.130.204,00	49.912.130.204,00
	Modal Hibah	-	-
	Penyertaan Pemerintah	-	-
	Akumulasi Laba (Rugi) sampai Tahun Lalu	(16.408.494.071,00)	(15.826.897.983,00)
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	174.393.415,00	(581.596.088,00)
	Jumlah Ekuitas	33.678.029.548,00	33.503.636.133,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.429.965.738,00	34.411.401.223,00

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
 LAPORAN LABA - RUGI KOMPARATIF
 TAHUN 2022 DAN 2021

NO.	URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
I	PENDAPATAN OPERASIONAL		
	Pendapatan Bagi Hasil dan Fee	-	-
	Pendapatan Usaha Property	-	-
	Pendapatan Usaha Tambak Ikan	-	-
	Pendapatan Sewa	600.000.000,00	511.680.000,00
	Pendapatan Unit Usaha Travel	6.126.545,00	2.756.791,00
	Pendapatan Angkutan Pasir	-	-
	Pendapatan Unit Usaha ATK, Percetakan dan Papan Ucapan	1.787.128,00	3.786.250,00
	Pendapatan Lumbung Pangan Tahap I (Beras)	114.993.502,00	108.174.861,00
	Pendapatan Usaha Area Parkir dan Lahan	199.350.000,00	95.890.000,00
	Pendapatan Sewa Kios Food Court	1.121.250.000,00	780.915.000,00
	Jumlah Pendapatan Operasional	2.043.507.175,00	1.503.202.902,00
II	BEBAN OPERASIONAL		
	Beban Operasional Tambak	-	-
	Beban Operasional Lumbung Pangan Tahap I (Beras)	120.459.566,00	30.002.333,00
	Beban Operasional Food Court	86.684.500,00	72.908.500,00
	Beban Operasional Pabrik Pupuk	19.552.500,00	20.243.300,00
	Beban Operasional Penjualan Cabe Cakra	-	-
	Beban Operasional ATK, Percetakan dan Papan	-	-
	Beban Administrasi dan Umum	1.563.893.477,00	2.095.842.952,00
	Jumlah Beban Operasional	1.790.590.043,00	2.218.997.085,00
	Laba (Rugi) Operasional	252.917.132,00	(715.794.183,00)
III	HARGA POKOK PENJUALAN		
	Harga Pokok Penjualan	-	-
	Laba Kotor Usaha		
IV	PENDAPATAN / BEBAN NON OPERASIONAL		
	Pendapatan atas Jasa Giro	5.659.610,00	6.431.442,00
	Pendapatan Non Operasional Lainnya	18.375.000,00	130.460.790,00
	Jumlah Pendapatan Non Operasional	24.034.610,00	136.892.232,00
	Beban Pajak	1.426.400,00	1.273.437,00
	Beban Bunga dan Administrasi Bank	1.131.928,00	1.420.700,00
	Kerugian atas Penjualan Aset Tetap	-	-
	Kontribusi PAD	100.000.000,00	-
	Beban Penghapusan Aset Tetap	-	-
	Beban Penghapusan Piutang	-	-
	Jumlah Beban Non Operasional	102.558.328,00	2.694.137,00
	Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional	(78.523.718,00)	134.198.095,00
	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	174.393.414,00	(581.596.089,00)

PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 LAPORAN ARUS KAS
 Per Tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Rugi Bersih	174.393.415,00	- 581.596.088,00
Penyesuaian untuk merekonsiliasi :		
Penyusutan aset tetap	42.996.878,00	578.434.528,00
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	217.390.293,00	- 5.161.580,00
Perubahan aset dan kewajiban operasi :		
Piutang	- 19.153.760,00	828.000.000,00
Aset lain-lain	61.500.685,00	- 99.027.942,00
Utang Biaya	- 8.228.900,00	2.991.700,00
Pendapatan ditangguhkan	- 147.600.000,00	- 10.800.000,00
Utang lain-lain	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	<u>- 113.481.975,00</u>	<u>721.163.758,00</u>
	<u>103.908.318,00</u>	<u>716.002.198,00</u>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	-	- 10.250.000,00
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>-</u>	<u>- 10.250.000,00</u>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Koreksi Lebih Catat Piutang CV Zanzibar Raya	-	-
Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	<u>-</u>	<u>-</u>
Kenalkan (Penurunan) Kas Bersih	103.908.318,00	705.752.198,00
Kas dan Setara Kas Awal Periode	1.184.880.713,00	479.128.515,00
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	<u>1.228.789.030,00</u>	<u>1.184.880.713,00</u>

Kinerja BUMD : Perusda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

Capaian	:	55.30
Kategori	:	Kurang Sehat (BBB)

Kinerja Keuangan

Capaian Kinerja Keuangan			33,50
No	Nama Indikator	Hasil	Nilai
1.	Rasio Laba terhadap Ekuitas/Imbalan Kepada Pemegang Saham (ROE)	0,52	2,00
2.	Rasio Laba terhadap Investasi/Imbalan Investasi (ROI)	0,51	2,00
3.	Rasio Kas	745,61	5,00
4.	Rasio Lancar	6847,69	5,00
5.	Collecting Period	251,71	5,00
6.	Perputaran Persediaan	885,28	5,00
7.	Perputaran Total Asset /Total Asset Turn Over (TATO)	6,01	3,00
8.	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva	144,47	6,50

Kinerja Operasional

Capaian Kinerja Operasional					11,80
No	Perspektif	Nama Indikator	Hasil	Bobot	Nilai
1.	Perspektif Pelanggan .	Tingkat penyelesaian keluhan pelanggan	100	2	2,00
2.	Perspektif Pelanggan .	Rasio pertumbuhan pelanggan	100	2	2,00
3.	Perspektif Pelanggan .	Indeks Kepuasan Pelanggan	100	3	3,00
4.	Perspektif Bisnis Proses.	Kualitas Produk/Jasa yang dihasilkan	20	2	0,40
5.	Perspektif Bisnis Proses.	Tingkat penjualan Produk/Jasa yang dihasilkan	80	2	1,60
6.	Perspektif Learning and Growth .	Pencapaian target biaya pengembangan	20	1	0,20
7.	Perspektif Learning and Growth .	Penggunaan TI dalam penyediaan Produk/Jasa kepada pelanggan	80	2	1,60
8.	Perspektif Learning and Growth .	Rasio diklat pegawai	100	1	1,00

Kinerja Administrasi

Capaian Kinerja Administrasi			10
No	Nama Indikator	Bobot	Nilai
1.	Laporan Tahunan Jangka waktu laporan audit diterima Pemegang Saham/Kepala Daerah	10	10,00
2.	RKAP Jangka waktu surat pengesahan RKAP diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	5	0,00